

**SKRIPSI**  
**SISTEM PEMERINTAHAN LOKAL PADA MASA**  
**PEMERINTAHAN AFDELING MANDAR**



disusun dan diajukan oleh  
**MUHAMMAD FIQRI SHIDDIQ**  
**E051 201 053**

**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**SISTEM PEMERINTAHAN LOKAL PADA MASA PEMERINTAHAN  
AFDELING MANDAR**

Disusun dan diajukan oleh :

**Muhammad Fiqri Shiddiq**

**E051 201 053**

Menyetujui,

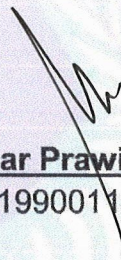
Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si**

NIP. 19680411 200012 1 001



**Ashar Prawitno S.IP, M.Si**

NIP. 19900110 201904 3 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



**Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si**

NIP. 19790106 200501 1 001

**LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI**

**SISTEM PEMERINTAHAN LOKAL PADA MASA PEMERINTAHAN  
AFDELING MANDAR**

**Disusun dan diajukan oleh :**

**Muhammad Fiqri Shiddiq**

**E051 201 053**

**Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia  
ujian skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin**

Makassar,

2024

Menyetujui,

**PANITIA UJIAN**

Ketua : Dr. H. Suhardiman Syamsu M.Si

Sekretaris : Ashar Prawitno S.IP, M.Si

Anggota : Prof. Dr. Rabina Yunus M.Si

Anggota : Irwan Ade Saputra S.IP, M.Si

Pembimbing I : Dr. H. Suhardiman Syamsu M.Si

Pembimbing II : Ashar Prawitno S.IP, M.Si

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fiqri Shiddiq

NIM : E051201053

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : Strata 1 ( S1 )

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis yang berjudul :

### **SISTEM PEMERINTAHAN LOKAL PADA MASA PEMERINTAHAN AFDELING MANDAR**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi saya ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 5 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



*Muhammad Fiqri Shiddiq*  
Muhammad Fiqri Shiddiq

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan berkah, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Sistem Pemerintahan Lokal pada Masa Pemerintahan Afdeling Mandar". Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S1) di Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan kita, sang revolusioner sejati, Nabiullah Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Meskipun demikian, tentunya penulis juga memiliki tekad dan niat yang kokoh agar mampu menghasilkan skripsi yang baik dan bermanfaat. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sering dipertemukan dengan berbagai hambatan, namun hambatan itulah yang membuat penulis semangat untuk bangkit dan meneruskan apa yang penulis telah mulai sampai sejauh ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis mendapatkan banyak dukungan, doa, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya khususnya kepada kedua orang tua penulis Shiddiq dan Neneng Sari, serta saudara penulis Faqih, Kalsum, Ulmi dan Ulfi. Terima Kasih atas segala bentuk dorongan dan dukungan yang telah diberikan serta harapan mulia yang membuat penulis agar bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Aamiin

Selain itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya;
2. Dr. Phil Sukri, S.IP, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya;
3. Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
4. Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si selaku Pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sejak proposal hingga penyelesaian skripsi ini;

5. Bapak Ashar Prawitno, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan memberikan banyak ilmu baru dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
7. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin M.Si, Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si, Dr. A. Rusli, M.Si, Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, Irwan Ade Saputra, S.IP, M.Si, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, Saharuddin S.IP, M.Si, Yusriah Amalia, S.IP, M.AP, Muhammad Chaeroel Anshar, S.IP, M.Sc, yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
8. Para pegawai dan staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan kepada penulis;
9. Seluruh staf tata usaha serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam hal persuratan dan pelayanan administrasi;

10. Para informan dalam penulisan skripsi ini yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam melakukan pengumpulan data dan sesi wawancara;
11. Teman-teman AFEGRA 58, Khususnya ASTERIUM 58 yang telah kebersamai dan menyemangati penulis dalam proses penulisan Skripsi ini;
12. Terima kasih kepada Multasya telah menjadi partner sekaligus Support System Penulis dalam setiap proses yang dilalui bersama juga untuk semua hal-hal yang baik semoga sehat selalu dan panjang umur;
13. HIMPUSHKA, yang juga banyak membantu dan support serta teman berdiskusi penulis dalam menyelesaikan Skripsi;
14. Teman-teman Angkatan 2020 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menjadi teman belajar dan berpikir pada saat perkuliahan;
15. Saudara-saudaraku Maintiendrai 20 Dadang, Rifky, Ricky, Lucky, Ambar, Adnan, Hanafi, Agum, Zacky, Ari, Wisnu, Sarlin, Selvi, Aurel, Andis, Nafta, Pute, Mute, Rara, Salma, Nirmala, Pitti, Billy ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas segala dukungan dan selalu kebersamai penulis dari maba hingga sekarang;
16. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) yang telah memberikan ruang belajar, pengalaman, dan cerita yang tidak dapat dilupakan



17. PUSAKAKU, yang telah banyak membantu penulis dalam proses penulisan skripsi seperti referensi, data dan arsip sebagai penunjang penyelesaian skripsi ini;
18. Penghuni grup Kota Daeng, teman seperjuangan penulis merantau yang juga banyak membantu dan mendukung penulis dalam proses penyelesaian skripsi penulis;
19. Remaja, Jamaah Masjid dan Masyarakat Tanjung Batu, yang selalu mendukung penulis dalam mencapai cita-cita dan impian penulis;
20. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Makassar, 5 Mei 2024

Muhammad Fiqri Shiddiq

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	i
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
GLOSARIUM .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Landasan Teori.....	15
2.2.1 Sistem .....	15

2.2.2	Pemerintahan .....	16
2.2.3	Sistem Pemerintahan .....	18
2.2.4	Pemerintahan Lokal .....	18
2.2.5	Pemerintah Hindia Belanda.....	19
2.2.6	Afdeling Mandar .....	20
2.2.7	Kepemimpinan .....	21
2.2.8	Pembagian Kewenangan dan Kekuasaan .....	24
2.3	Kerangka Pikir .....	26
2.4	Kerangka Konseptual.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....		29
3.1	Metode Penelitian .....	29
3.2	Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	29
3.3	Sumber Data.....	29
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5	Teknik Analisis Data .....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		34
4.1	Gambaran Umum Suku Mandar .....	34
4.1.1	Pengertian Kata Mandar .....	34
4.1.2	Letak Astronomi dan Letak Geografis Suku Mandar .....	36
4.1.3	Sejarah Pemerintahan Mandar .....	37

4.2	Gambaran Umum Afdeling Mandar .....	50
4.3	Gaya dan Pola Kepemimpinan Kerajaan Balanipa .....	53
4.4	Pembagian Kewenangan dan Kekuasaan pada Pemerintahan Afdeling Mandar .....	66
BAB V PENUTUP .....		97
5.1	Kesimpulan .....	97
5.1.1	Pola dan Gaya Kepemimpinan Kerajaan Balanipa.....	97
5.1.2	Pembagian Kewenangan dan Kekuasaan pada Pemerintahan Afdeling Mandar .....	99
5.2	Saran .....	100
DAFTAR PUSTAKA.....		102
LAMPIRAN.....		107

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matriks Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 2 Perbedaan Periode Tomakaka dan Mara'dia.....	50
Tabel 3 Perubahan Distrik dan Gelar Kepala Distrik.....	87
Tabel 4 Perubahan jabatan Swapraja( <i>Zelfbestuur</i> ) dan status keanggotaan Kerajaan Sendana .....	89
Tabel 5 Perubahan jabatan Swapraja( <i>Zelfbestuur</i> ) dan status keanggotaan Kerajaan Banggae .....	91
Tabel 6 Perubahan jabatan Swapraja( <i>Zelfbestuur</i> ) dan Status keanggotaan kerajaan Pamboang .....	92
Tabel 7 Perubahan jabatan Swapraja( <i>Zelfbestuur</i> ) dan status keanggotaan Kerajaan Tappalang .....	93
Tabel 8 Perubahan jabatan Swapraja( <i>Zelfbestuur</i> ) dan status keanggotaan Kerajaan Mamuju .....	94
Tabel 9 Perubahan jabatan Swapraja( <i>Zelfbestuur</i> ) dan status keanggotaan kerajaan Binuang .....	96

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 2 Kerangka Konseptual.....	28
Gambar 3 Model Analisis Data Interaktif dari Miles dan Huberman.....	32
Gambar 4 Struktur Kepemimpinan Tomakaka .....	42
Gambar 5 Assitaliang Puang dipoyosang .....	55
Gambar 6 Pesan I manyambungi .....	61

## **GLOSARIUM**

- Afdeling : Pembagian administratif tingkat II di pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Asisten Residen
- Asisten Residen : Seorang kepala pemerintahan tingkat II ( Afdeling ) di pemerintahan Hindia Belanda.
- Appe' Banua Kayyang : Empat wilayah besar yang berada di wilayah kerajaan Balanipa dan merupakan perwakilan (dewan adat) kerajaan Balanipa.
- Animisme-dinamisme : Kepercayaan penyembahan dan pemujaan terhadap roh leluhur serta kepercayaan terhadap benda-benda yang dikeramatkan.
- Demokratisasi : Transisi pemerintahan struktural dari pemerintah otoriter ke rezim politik yang lebih demokrasi.
- Demokrasi Deliberatif : Bentuk demokrasi yang mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan yang mengutamakan kualitas daripada kuantitas.
- Dipesokko'l : Acara pelantikan Mara'dia (raja)
- Distrik : Pembagian wilayah administratif di pemerintahan Hindia Belanda yang setara dengan kecamatan.
- Kolonialisme : sistem dimana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal tersebut.

- Lontar/Lontaraq : Aksara Tradisional masyarakat Bugis-Makassar.
- Mara'dia : Periode kepemimpinan setelah era kepemimpinan Tomakaka dan juga merupakan sebutan raja pada saat itu.
- Onderafdeling : Wilayah administratif setingkat Kawedanan yang diperintah oleh wedana yang disebut Kontroleur.
- Pitu Ba'bana Binanga : Persekutuan tujuh kerajaan yang berada diwilayah muara sungai yang beranggotakan Kerajaan Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Tappalang, Mamuju dan Binuang
- Pitu Ulunna Salu : Persekutuan tujuh kerajaan yang berada diwilayah hulu sungai yang beranggotakan kerajaan Rante Bulahang, Aralle, Tabulahan, Mambi, Matangnga, Tabang, dan Bambang
- Tomakaka : Periode kepemimpinan sebelum era kepemimpinan Mara'dia dan juga merupakan sebutan raja pada saat itu.
- Pax Neerlandica : Politik Kolonial Belanda di Nusantara dengan upaya menyatukan wilayah-wilayah melalui perjanjian dan pendekatan militer.
- Pa'bicara : Jabatan Pembantu raja/pemimpin suatu wilayah dalam melaksanakan pemerintahan



- Pappuangan : Jabatan Pembantu raja/pemimpin suatu wilayah dalam melaksanakan pemerintahan.
- Sappulo Sokko' : Sepuluh pemegang jabatan pembantu raja dalam melaksanakan pemerintah di kerajaan Balanipa.
- Punggaw(h)a : Jabatan pembantu raja pada kerajaan Tappalang
- Todiyang Laiyana : Kelompok sosial di kerajaan Balanipa dan merupakan kelompok yang dapat menduduki jabatan Mara'dia (raja).
- Tau Pia : Kelompok sosial di kerajaan Balanipa dan merupakan kelompok yang dapat menduduki jabatan dewan adat (Sappulo sokko).
- Tomanurung : Orang yang dipercaya turun dari langit atau orang yang dipercaya pertama kali membangun peradaban.
- Tomatua : Orang yang dituakan/penasehat.
- Zelfbestuur (Swapraja) : Wilayah atau daerah yang memiliki hak pemerintahan sendiri.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang yang dulunya dikenal sebagai Nusantara telah melalui tahapan-tahapan penting dalam pembentukannya. Indonesia yang telah lama mempunyai sistem kepercayaan yang unik (animisme-dinamisme), mulai mengenal kegiatan pemerintahan sejak berdirinya kerajaan pertamanya, Kerajaan Kutai Kartanegara. Adanya proses antara yang diperintah (rakyat) dan penguasa (raja) menjadikan Kutai sebagai laboratorium pemerintahan pertama (yang tercatat dalam sejarah) di Indonesia.

Indonesia bukanlah negara baru dalam terminologi dan pemahaman proses pemerintahan. Sejarahnya cukup kuat untuk dimasukkan dalam kelompok negara dengan pengalaman luar biasa dalam urusan pemerintahan. Meski peradaban nusantara kalah kuno dibandingkan peradaban Yunani kuno, Persia, atau kekaisaran Tiongkok, namun tidak dapat dipungkiri kontribusi Indonesia dalam sejarah panjang peradaban dunia, khususnya dalam aspek politik/sosial, sulit untuk dilewatkan.

Sejarah pemerintahan Indonesia memberikan landasan penting untuk memahami struktur dan fungsi administrasi

pemerintahan. Indonesia telah mengalami banyak perubahan dalam struktur dan sistem pemerintahannya selama berabad-abad. Sejak zaman Kerajaan, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai bentuk sistem pemerintahan untuk mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Kerajaan awal seperti Sriwijaya dan Majapahit menggunakan sistem untuk menjaga stabilitas dan efisiensi pemerintahan. Pejabat kerajaan bertanggung jawab atas politik, pengumpulan pajak, pengadilan, dan fungsi administratif lainnya. Dengan dimulainya masa penjajahan Belanda di Indonesia, terjadi perubahan besar khususnya dalam sistem pemerintahan yang diterapkan (Nurdin, 2023).

Berdasarkan penelitian Absiroh dkk (2017) bahwa pada abad ke-15 salah satu peristiwa penting yang dapat mempengaruhi jalannya sejarah dunia adalah jatuhnya kota Konstantinopel ibu kota Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 1453. Dalam peperangan yang sengit, Turki Utsmani yang beragama Islam akhirnya berhasil merebut kota tersebut dari Konstantinopel. Dengan demikian, terbukalah pintu bagi para pemimpin Islam untuk masuk ke Eropa. Namun bagi Eropa, jatuhnya Konstantinopel berarti rusaknya hubungan antara Barat dan Timur. Jalur perdagangan ke dunia timur juga terputus. Oleh karena itu, para bangsa Eropa harus mencari cara lain untuk mencapai dunia Timur.

Akhirnya bangsa Eropa mulai melakukan ekspedisi penjelajahan lautan yang dipimpin oleh Portugis dan Spanyol. Setelah menjelajahi lautan, mereka sampai di benua Afrika dan Asia dan sampai di nusantara dengan tujuan berdagang. Namun setelah mengetahui negara-negara Afrika dan Asia lemah, muncullah niat untuk menerapkan kolonialisme dan imperialisme. Salah satu negara Eropa pertama yang mencapai nusantara adalah Portugis pada tahun 1512 di bawah pimpinan Fancisco Serrão, yang mencapai Hitu (utara Ambon). Kemudian disusul oleh negara-negara eropa lainnya salah satunya adalah Belanda.

Pada tanggal 27 Juni 1596, Empat kapal Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman kemudian tiba di perairan Banten. Sebelum meninggalkan Amsterdam, Cornelis mendapat informasi bahwa di dunia Timur terdapat pulau penghasil rempah-rempah yakni Nusantara. Pada hari itu, Belanda menemukan Banten, yang sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari kepulauan rempah-rempah paling menarik di dunia. Penerapan kolonialisme Belanda di Nusantara tersebut segera dimulai dan Cornelis de Houtman sebagai pembuka jalan ini.

Sebelum Belanda datang ke Mandar, masyarakat Mandar menjalani kehidupan sangat rukun dan aman mulai dari kehidupan antar perseorangan sampai pada kehidupan antar kelompok. Hal ini dapat dilihat dari budaya dan adat istiadat serta perjanjian-perjanjian

persahabatan maupun kerjasama. Salah satu perjanjian yang dapat membuktikan kerukunan orang-orang Mandar yakni pada perjanjian antar sesama kerajaan di Pitu Ba'ba Binanga (Tujuh Kerajaan di Muara Sungai). Sementara itu, (Karim A. , 2019) sekitar abad ke XV sudah berdiri kerajaan di Mandar pada era Pemerintahan Tomakaka salah satunya adalah Kerajaan Pasokkorang. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Tomakaka Raja Lareang yang berhasil menguasai dan memberikan pengaruh yang cukup besar pada saat itu. Namun dalam sumber sejarah bahkan literatur sejarah Mandar, kerajaan Passokkorang dianggap sebagai pemerintahan yang kejam, menindas kerajaan-kerajaan di sekitarnya, termasuk kerajaan Napo. Kemudian Kerajaan Napo menjemput I Manyambungi (todilaling) ke Gowa untuk meminta bantuan dalam mengalahkan kerajaan Passokkorang yang menindas kerajaan tersebut.

Menurut W.J. Leyds dalam catatannya (Luhukay dan Tuwanakotta, 2006) Pada abad XVI peralihan dari Pemerintahan Tomakaka menjadi Pemerintahan Mara'dia dimulai pada saat I Manyambungi berhasil menghancurkan bentuk Pemerintahan Tomakaka kemudian pemerintahan Mara'dia disempurnakan oleh Tomepayung yang merupakan anak dari I Manyambungi (Todilaling). Hasil dari terbentuknya pemerintahan Mara'dia ini, disinilah cikal bakal terbentuknya mandar dalam bentuk persekutuan yakni Pitu

Ba'bana Binanga (Tujuh Kerajaan Muara Sungai/Pesisir Pantai) yang digagas oleh Tomepayung sebagai Mara'dia Balanipa II.

Sementara itu, Pemerintah Hindia Belanda ingin melakukan Ekspedisi Militer sesuai dengan misi utama dari Pemerintah Hindia Belanda yakni melakukan politik pasifikasi. Strategi politik yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda bertujuan untuk menguasai sepenuhnya wilayah nusantara yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan wilayah lainnya. Sulawesi menjadi salah satu wilayah yang menjadi fokus penaklukan dalam upaya pengendalian tersebut. Kerajaan Gowa menjadi salah satu wilayah yang dikuasai pada tahun 1824 dan tunduk langsung pada pemerintahan Belanda. Berbeda dengan Kerajaan Gowa, Kerajaan Mandar pada tahun 1848 belum menjadi wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda (Karim A. , 2020).

Tindakan Pemerintah Hindia Belanda tentu saja berdasarkan tujuan politik. *Pax Nerlandica* merupakan usaha Pemerintah Kolonial Belanda untuk, “menggenggam” atau menguasai seluruh wilayah kekuasaanya di Nusantara dengan membentuk sistem pemerintahan. Selanjutnya keinginan pemerintah Belanda ingin mengganti pemerintahan tradisional (kerajaan) menjadi sistem pemerintahan ala kolonial. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mempermudah pemerintah Belanda mengontrol wilayah-wilayah di Nusantara yang mempunyai kedudukan yang cukup penting.

Menurut Locher-Scholten (Karim A., 2018) Dalam mencapai tujuan politik yang di inginkan Pemerintah Hindia Belanda maka dilaksanakanlah politik pasifikasi. Karena ekspansi berdasarkan pada politik etis mempunyai tujuan mulia yakni *pacifying* dan memajukan kaum pribumi. Konsep pasifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda sepertinya tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masyarakat pribumi saat itu. Pemerintah memang menginginkan keteraturan dalam birokrasi untuk mengurus rakyat saat itu dan tentu saja untuk mempermudah pemerintah dalam pengontrolan wilayah.

Pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan ekspedisi militer ke sebagian wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Pulau Lombok. Kekuasaan pemerintah kolonial meluas ke seluruh nusantara sekitar tahun 1901 dan 1910, dan kendali atas wilayah tersebut diambil alih dari penguasa lokal yang tersisa. Ekspedisi militer ke wilayah Sulawesi dilakukan pada tahun 1905 hingga 1906, khususnya wilayah Mandar. Ekspedisi militer Belanda tahun 1905–1907 berdampak pada status wilayah Mandar dalam sistem administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Status wilayah Mandar dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda berubah pada tahun 1907. Status Mandar sebagai onderafdeling wilayah Afdeling Pare-Pare menjadi Afdeling Mandar yang berdiri sendiri di mulai tahun 1909 (Karim A. , 2020).

Selama Dominasi Pemerintah Kolonial Belanda, Celebes mengalami banyak perubahan terutama dalam bidang pemerintahan (Poelinggomang, Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942, 2004, hal. 89). Tentu saja tujuan Pemerintah saat itu adalah kepentingan Ekonomi yang berbungkus Politik. Bahwa kebijakan politik yang diambil oleh Belanda tidak akan bisa lepas dari kepentingan ekonomi.

Perubahan sistem pemerintahan di *Celebes* pada masa Hindia Belanda membawa dampak langsung bagi kerajaan-kerajaan besar maupun kecil khususnya kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah Mandar juga mengalami perubahan setelah kerajaan-kerajaan tersebut ditaklukkan atau berkerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda

Berdasarkan penjelasan diatas maka penting adanya penelitian ini untuk mengetahui sejarah perkembangan sistem pemerintahan di Mandar. Khususnya pada saat Belanda tiba di Nusantara dan melakukan ekspedisi dengan tujuan untuk menguasai wilayah di Nusantara salah satunya adalah wilayah Mandar. Sehingga memunculkan permasalahan karena adanya sistem pemerintahan yang sedang berjalan di Mandar yakni Sistem Pemerintahan Kerajaan pada saat itu, lalu ingin di kuasai oleh Belanda dan melakukan perombakan dan perubahan mulai dari pembagian kekuasaan sampai pada administrasi dan wilayah Mandar



yang pada saat belanda berhasil menguasai wilayah tersebut diubah menjadi wilayah administrasi Afdeling Mandar.

Penelitian ini berfokus pada pola dan gaya kepemimpinan kerajaan Balanipa berdasarkan Teori Kepemimpinan dan juga penelitian ini membahas pembagian kewenangan dan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda setelah menguasai wilayah Mandar yang mana objeknya adalah pejabat di Kerajaan di wilayah Pitu Ba'bana Binanga (tujuh Kerajaan di muara sungai) berdasarkan Teori Pembagian Kewenangan dan Kekuasaan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan sistem Pemerintahan Pada Masa Pemerintahan Afdeling Mandar, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Pemerintahan Lokal pada Masa Pemerintahan Afdeling Mandar”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana Gaya dan pola Kepemimpinan Kerajaan Balanipa ?
2. Bagaimana Sistem Pembagian Kewenangan dan Kekuasaan pada Pemerintahan Afdeling Mandar ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Gaya dan Pola Kepemimpinan Kerajaan Balanipa
2. Sistem Pembagian Kewenangan dan Kekuasaan pada Pemerintahan Afdeling Mandar

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoritis dalam pengembangan disiplin Ilmu Pemerintahan mengenai sistem pemerintahan lokal pada masa pemerintahan Afdeling Mandar. Menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dengan objek penelitian yang sejenis.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat membantu peneliti dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan praktik terkait Sistem Pemerintahan Lokal khususnya pada Masa Pemerintahan Afdeling Mandar.

- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat membantu masyarakat Sulawesi Barat pada umumnya dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dan praktik sistem pemerintahan lokal khususnya pada masa pemerintahan Afdeling Mandar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdul Karim mengenai Kajian Sistem Pemerintahan Kerajaan Balanipa Abad XVI-XVII, penelitian ini membahas mengenai sistem peralihan pemerintahan dari masa pemerintahan Tomakaka menjadi Sistem Pemerintahan Mara'dia disebabkan pada masa pemerintahan Tomakaka banyaknya terjadi permasalahan sehingga Mara'dia pertama Kerajaan Balanipa (I Manyambungi) menjatuhkan kerajaan Pasokkorang yang masih menganut sistem Pemerintahan Tomakaka. Dan disempurnakan oleh anaknya yakni To Mepayung Mara'dia Kerajaan Balanipa II dan berhasil menyatukan beberapa kerajaan di Mandar khususnya kerajaan yang berada di sekitaran pesisir Pantai.

Penelitian lain yang membahas tentang Penataan Mandar Masa Kolonial Belanda 1905-1942 yang ditulis oleh Muhammad Amir membahas tentang penataan wilayah mandar ketika diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda mulai dari pembagian kekuasaan sampai pada pembentukan serta pembagian tugas pokok dan fungsi di setiap lembaga.

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Afdeling Mandar yakni Rekonstruksi Mandar: Otoritas Hindia Belanda dan

Lahirnya Afdeling Mandar 1905-1942 ditulis oleh Abdul Karim membahas mengenai proses penguasaan Belanda terhadap Mandar dan merubah mandar secara administrasi serta wilayahnya yang bertujuan agar pajak dapat terserap dengan baik dan masuk ke kas Belanda.

Pada penelitian yang berjudul Ekspedisi Militer Belanda di Mandar 1905-1907 yang ditulis oleh Abdul Karim membahas tentang penguasaan penuh atas wilayah-wilayah di Hindia Belanda yang statusnya masih sebagai negara sekutu, termasuk kerajaan-kerajaan di Sulawesi.

Penelitian selanjutnya terkait sistem pemerintahan pada kolonial yaitu Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Onderafdeling Bonthain 1905-1942 yang ditulis oleh Nur Laely membahas mengenai proses peralihan dari sistem pemerintahan tradisional ke sistem pemerintahan kolonial dan pengaruh sistem pemerintahan kolonial terhadap politik dan aktivitas perekonomian di Onder Afdeling Bonthain 1905-1942.

**Tabel 1** Matriks Penelitian Terdahulu

NO.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
1.	Kajian Sistem Pemerintahan Kerajaan Balanipa Abad XVI-XVII	Abdul Karim (2019)	Untuk mengetahui praktek-praktek demokrasi diterapkan di Mandar, dan sistem pemerintahan yang dijalankan di Mandar pada abad XVI-XVII.	Penelitian Sejarah	Peralihan sistem pemerintahan dan sistem kepemimpinan dari Sistem Pemerintahan Tomakaka menjadi sistem pemerintahan Mara'dia.	Penelitian yang saya lakukan berfokus pada pola dan gaya kepemimpinan pada era Mara'dia di kerajaan Balanipa serta pembagian kekuasaan dan kewenangan pada pemerintahan Afdeling Mandar
2.	Penataan Mandar Masa Kolonial Belanda 1905-1942	Muhammad Amir (2016)	untuk mengungkapkan dan menjelaskan berbagai hal menyangkut dinamika kesejarahan daerah itu, terutama pada periode kolonial.	Penelitian Sejarah	penataan wilayah mandar ketika diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda mulai dari pembagian kekuasaan sampai pada pembentukan serta pembagian tugas pokok dan fungsi di setiap lembaga.	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amir berfokus pada penataan wilayah Mandar setelah Belanda mengambil alih wilayah Mandar sedangkan Penelitian yang saya lakukan menambahkan pembahasan mengenai pola dan gaya kepemimpinan pejabat di kerajaan Balanipa serta menampilkan sekilas pembagian kekuasaan dan kewenangan sebelum Pemerintah Belanda mengambil alih wilayah Mandar.
3.	Rekonstruksi Mandar: Otoritas Hindia	Abdul Karim (2020)	Untuk mengetahui Otoritas Pemerintah	Penelitian Sejarah	adanya Otoritas Belanda dalam periode 1905-1942 dan	Pembahasan jurnal yang ditulis oleh Abd. Karim ini berfokus pada

	Belanda dan Lahirnya Afdeling Mandar 1905-1942		Hindia Belanda yang merekonstruksi Mandar dan respon Kerajaan-kerajaan Mandar atas pengaruh Belanda Konflik apa yang terjadi dalam periode rekonstruksi Mandar		mengubah wajah wilayah administrasi Mandar. Mulai dari hilangnya otoritas kerajaan, penarikan pajak berlebih kepada rakyat hingga hilang dan terbentuknya wilayah-wilayah baru.	peran Pemerintah Belanda dalam mengubah sistem yang berlaku di wilayah Mandar saat itu ke pemerintahan bentukan Belanda yaitu Afdeling sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas juga mengenai pola dan gaya kepemimpinan pejabat kerajaan Balanipa yang mana terjadi sebelum Belanda menguasai wilayah Mandar.
4.	Ekspedisi Militer Belanda di Mandar 1905-1907	Abdul Karim (2019)	Untuk Mengetahui Bagaimana dan mengapa ekspedisi militer yang menjadi kunci penguasaan Belanda di seluruh wilayah Sulawesi tersebut dapat berhasil	Penelitian Sejarah	Ekspedisi militer Belanda melahirkan pergulatan elite lokal yang dimanfaatkan Belanda untuk diadu domba. Belanda yang kesulitan menghadapi perlawanan rakyat Mandar akhirnya bersepakat dengan sebagian kelompok bangsawan untuk bekerja sama	Jurnal ini membahas tentang pergerakan militer Belanda untuk menguasai Wilayah Mandar dan beberapa perlawanan yang dipaparkan didalamnya sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas tentang sistem pemerintahan lokal pada masa pemerintahan Afdeling Mandar yang memuat kepemimpinan, kekuasaan dan kewenangan.
5.	Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Onderafdeling Bonthain 1905-1942	Nur Laely	Untuk mengetahui proses peralihan dari sistem pemerintahan tradisional ke sistem pemerintahan	Penelitian Sejarah	Terjadi peralihan dari sistem pemerintahan tradisional dimana dasar-dasar pelaksanaan pemerintahan tradisional/kakara engang berdasar	Penelitian yang saya lakukan berlokasi khusus di Afdeling Mandar sedangkan dalam jurnal yang ditulis oleh Nur Laely ini berlokasi

			kolonial, sistem administrasi pemerintahan kolonial, serta pengaruh sistem pemerintahan kolonial terhadap politik dan aktivitas perekonomian di Onder Afdeling Bonthain 1905-1942.		pada adat-istiadat, dan hukum kerajaan. pengaruh sistem pemerintahan kolonial terhadap politik dan aktivitas perekonomian di Onderafdeling Bonthain mengakibatkan terjadinya proses transformasi struktural dari struktur politik dan ekonomi tradisional ke arah struktur politik dan ekonomi kolonial dan modern	diwilayah Onderafdeling Bonthain dan juga pembahasannya mengarah pada perubahan dan dinamika pemerintahan tradisional sampai transformasi struktural yang berakibat pada sektor ekonomi dan politik.
--	--	--	--	--	--	--

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Sistem

Mexasai mengemukakan pendapat dari Ellydar Chaidir (Susilo dan Mohammad, 2018), Sistem merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata Syn dan kata Histani yang berarti menempatkan bersama (to pleace together). Secara umum merupakan suatu struktur yang terdiri dari bagian atau komponen yang saling berhubungan, dan jika salah satu komponen tersebut gagal atau tidak berfungsi dengan baik, maka akan berdampak pada komponen lainnya.

Menurut Fat (Hutahaeen J. , 2014) sistem adalah seperangkat “objek” nyata atau abstrak yang terdiri dari



bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, terhubung, bergantung, saling mendukung, yang keseluruhannya digabungkan menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

Romney dan Steinbart (Mulyani, 2016) Mengatakan Sistem adalah sekumpulan dua atau lebih komponen yang bekerja dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Dr.Ir. Harijono Djojodiharjo (Hutahaean J. , 2014) sistem adalah sekumpulan objek yang mencakup hubungan fungsional antara tiap-tiap objek dan hubungan antara citi tiap objek yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan secara fungsional.

### **2.2.2 Pemerintahan**

Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara seperti kabinet yang merupakan suatu pemerintah. Jadi, pemerintahan diartikan sebagai perbuatan memerintah.

Philipus M. Hadjon (Susilo dan Mohammad, 2018) menyatakan, pemerintahan ini dapat dilihat dari dua sudut

pandang, yaitu pertama pemerintahan dalam arti fungsional, khususnya kegiatan yang meliputi kegiatan pemerintahan dan Kedua pemerintahan dalam arti organisasi, khususnya kumpulan unit-unit pemerintahan

Pemerintahan yang sebenarnya dalam pandangan Muhadam Labolo adalah usaha untuk hidup bersama secara baik dan benar dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan bersama (Labolo, 2014).

The Liang Gie menyatakan bahwa untuk menghindari keraguan dalam memberikan pembatasan pengertian maka untuk istilah pemerintah menunjuk pada organnya sedangkan untuk istilah pemerintahan menunjuk pada fungsinya (Astomo, 2014).

Menurut Bagir Manan & Kuntana Magnar (Astomo, 2014) memberikan penjelasan mengenai pemerintah yakni Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan Negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara. Dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif.

### **2.2.3 Sistem Pemerintahan**

Menurut Sarundajang (Anangkota, 2017), sistem pemerintahan dapat disebut sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga – lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya baik langsung ataupun tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara tersebut.

Menurut Hendardi (Pakazeni dan Nabilla, 2020) Sistem Pemerintahan adalah sebuah sistem yang berisi sekumpulan aturanaturan dasar mengenai pola kepemimpinan, pola pengambilan keputusan, pola pengambilan kebijakan dan berbagai macam lainnya yang berguna untuk menjaga kestabilan pemerintahan dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan, dan lainnya.

Mexasai mengutip pendapat dari Mahfud MD, bahwa sistem pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara (Susilo dan Mohammad, 2018).

### **2.2.4 Pemerintahan Lokal**

Menurut Hoessein (Djaenuri dan Enceng, 2012) Konsep pemerintahan daerah berasal dari penjabaran konsep Local Government yang pada dasarnya mempunyai tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua

berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal. Pemerintah lokal pada pengertian pertama, menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pemerintahan lokal pada pengertian kedua, menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pemerintahan lokal pada pengertian ketiga, menunjuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom.

Dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia, Local Self Government adalah pemerintahan daerah otonom sebagai pemerintah daerah yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri (Djaenuri dan Enceng, 2012).

#### **2.2.5 Pemerintah Hindia Belanda**

Landasan pemerintahan Hindia Belanda adalah Konstitusi Kerajaan Hindia Belanda dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Hindia Belanda yang dirancang oleh kerajaan untuk pemerintahan Hindia Belanda dan baru dijadikan acuan pada tahun 1925. Pada masa penjajahan, khususnya masa pendudukan Belanda, pemerintah kolonial menerapkan desentralisasi yang bersifat sentralistik, birokratis, dan feodal untuk kepentingan kolonial. (Laely, 2018).

Struktur pemerintahan di negara jajahan menempatkan gubernur jenderal pada posisi yang sangat berkuasa atas segala sesuatu urusan di wilayah jajahan. Gubernur jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pada gubernur dan residen.

#### **2.2.6 Afdeling Mandar**

Menurut Tanawali Azis Syah (Amir, Penataan Mandar Masa Kolonial Belanda 1905-1942, 2016) Afdeling Mandar merupakan dua wilayah persekutuan pada zaman pemerintah kolonial Belanda yang membawahi empat wilayah Onderafdeling yakni Majene, Mamuju, Polewali, dan Mamasa. Kedua persekutuan tersebut berasal dari Kerajaan-kerajaan di daerah Mandar yang terdiri atas persekutuan Pitu Baqbana Binanga (tujuh kerajaan di muara sungai atau pesisir pantai) dan Pitu Ulunna Salu (tujuh kerajaan di hulu sungai).

Dalam Arsip Nasional, Regeerings Almanak Voor Nederlandsch-Indie (Karim A. , 2020) Pembentukan Afdeling Mandar baru diresmikan dalam keputusan Pemerintah tanggal 5 Juli 1909 No.17 dan secara resmi terlepas dari Afdeling Pare-Pare. Wilayah ini juga masih dibawah pemerintahan controleur L.J.J. Carou dengan Majene sebagai ibu kota Afdeling.

Mandar dalam konteks administratif, Pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1906-1942 menyatakan Mandar sebagai wilayah Afdeling Mandar dibawah Gouvernement Celebes Ondehorigheden.

### **2.2.7 Kepemimpinan**

Menurut Katz dan Kahn (Wibowo, 2011) berbagai definisi kepemimpinan pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar yakni “sebagai atribut atau kelengkapan dari suatu kedudukan, sebagai karakteristik seseorang, dan sebagai kategori perilaku”.

Menurut Ordway Tead (Hutahaean W. S., 2021) Kepemimpinan adalah penggabungan perangai yang membuat seseorang mungkin dapat mendorong beberapa pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut

Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (Wibowo, 2011) mengemukakan pengertian kepemimpinan sebagai karakteristik seseorang bahwa pemimpin merupakan agen perubahan, orang yang bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari orang lain mempengaruhi dirinya.

Ada beberapa pendekatan dalam teori kepemimpinan diantaranya :

a. Pendekatan Sifat

Stogdill (Wibowo, 2011) menyebutkan pendekatan sifat kepemimpinan mengacu pada ciri-ciri fisik dan kepribadian pemimpin, antara lain: usia, penampilan, kemampuan berbicara, kecerdasan, aktif, dominan, percaya diri, ekstrovert, didorong oleh kesuksesan, dikaitkan dengan kemampuan kepemimpinan yang efektif.

b. Pendekatan Gaya

Teori gaya kepemimpinan berupaya untuk mengkaji perilaku atau tindakan pemimpin yang dimaksudkan untuk mempengaruhi dan/atau memobilisasi pengikut untuk mencapai tujuan. Perilaku dan tindakan tersebut pada dasarnya dapat dipahami sebagai dua hal yang berbeda namun saling berhubungan yakni fokus pada penyelesaian tugas (pekerjaan) dan fokus pada upaya melatih karyawan untuk melakukan tugas layanan/pekerjaan ini (Wibowo, 2011).

Menurut JAF.Stoner (Hutahaean W. S., 2021) bahwa kecenderungan Kepemimpinan Perilaku pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari masalah fungsi dan gaya kepemimpinan yakni seorang pemimpin yang baik adalah bagaimana seorang pemimpin memiliki perhatian yang tinggi terhadap bawahan dan terhadap hasil yang tinggi juga.

Lewin, Lippitt, dan White (Wibowo, 2011) pada tahun 30-an melakukan studi terkait dengan tingkat keketatan pengendalian, dan melahirkan terminologi gaya kepemimpinan autocratic, democratic, dan laissez-faire.

- Autocratic/otokrasi, mengacu pada tingkat kontrol yang tinggi tanpa kebebasan dan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan.. Pemimpin bersifat otokratis, tidak mau mendelegasikan, dan tidak menyukai partisipasi anggota.
- Democratic/Demokrasi, merujuk pada tingkat kendali yang longgar, namun pemimpin sangat aktif dalam mendorong diskusi kelompok dan pengambilan keputusan kelompok, kebijakan atau keputusan dibuat bersama-sama, komunikasi bersifat timbal balik dan kreatif. Pendapat bisa datang dari pemimpin ataupun anggota.
- laissez-faire, Menunda atau membiarkan anggota mengambil keputusan sendiri, pemimpin berperan pasif dan hampir tidak mempunyai kontrol/pengawasan, sehingga keberhasilan organisasi ditentukan oleh masing-masing individu atau setiap orang.



### c. Pendekatan Kontingensi/Situasional

Teori kontingensi menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi tugas kelompok (group task situation) dan tingkat-tingkat daripada gaya kepemimpinannya, kepribadiannya dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya (Hutahaean W. S., 2021).

Menurut Robert House (Hutahaean W. S., 2021) Kepemimpinan Situasional adalah kepemimpinan yang perilaku pimpinan berdampak terhadap anggota, baik motivasi, kepuasan, dan kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor situasi.

Vroom Yetton (Hutahaean W. S., 2021) berpendapat bahwa Kepemimpinan Situasional adalah kepemimpinan yang komponen utamanya adalah efektivitas pemimpin dalam mengambil keputusan yang sangat menentukan keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas pentingnya.

#### **2.2.8 Pembagian Kewenangan dan Kekuasaan**

Ada dua istilah terkait teori pemisahan kekuasaan yang diperkenalkan oleh John H Garvey dan T. Alexander Aleinikooff. Kedua istilah ini dijelaskan dalam teori pemisahan kekuasaan yang mengenal dua bentuk pembagian

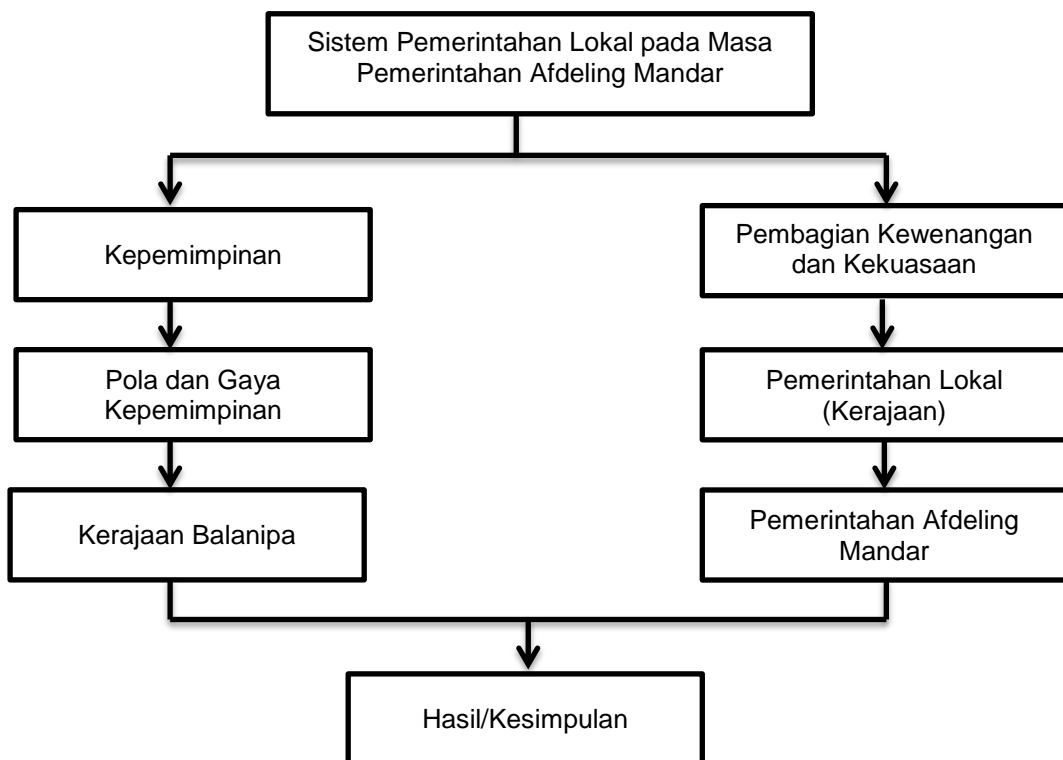
kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan vertikal dan horizontal. Desentralisasi melibatkan pembagian kekuasaan secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah atau negara bagian, sedangkan fungsi negara melibatkan pembagian kekuasaan secara horizontal antara fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Marlina, 2018).

Montesquieu (Yani, 2018) menjelaskan bahwa dalam pemerintahan negara terdapat 3 (tiga) jenis kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang.

Menurut Logemann (Yani, 2018), fungsi kekuasaan Negara dapat dibagi menjadi 5 (lima) bidang, yaitu fungsi perundang-undangan (fungsi untuk membuat undang-undang), fungsi pelaksanaan (fungsi melaksanakan undang-undang), fungsi pemerintahan (dalam arti khusus), fungsi kepolisian (fungsi menjaga ketertiban, melakukan penyelidikan dan penyidikan), dan fungsi peradilan (fungsi mengadili pelanggaran terhadap undang-undang).

### 2.3 Kerangka Pikir

Terdapat beberapa hal pokok yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan dalam penelitian, maka dibentuklah kerangka pikir sebagai berikut :



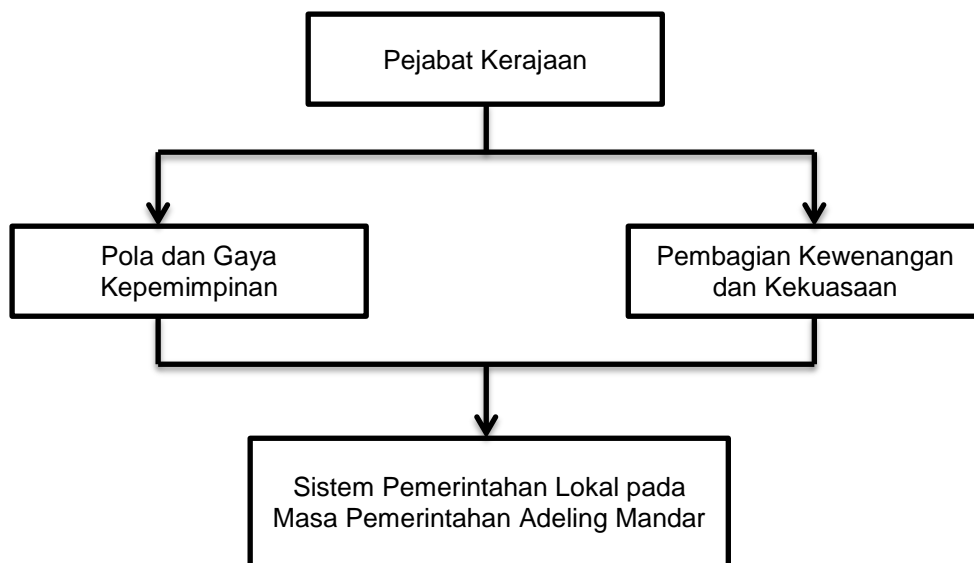
**Gambar 1** Kerangka Pikir

Penelitian ini merujuk pada sistem pemerintahan Lokal pada Masa Pemerintahan Afdeling Mandar yang fokus penelitiannya terbagi 2 yakni pada sistem kepemimpinan dan pembagian kewenangan serta kekuasaan. Pada fokus penelitian sistem kepemimpinan digunakan teori kepemimpinan yaitu Teori Gaya Kepemimpinan yang merujuk kepada suatu tokoh yakni pejabat-pejabat di Kerajaan Balanipa. Kemudian untuk mencapai suatu

kesimpulan diperlukan analisis mengenai pola gaya kepemimpinan. Begitupun dengan fokus penelitian pembagian kewenangan dan kekuasaan. Yang perlu di analisis di bagian ini adalah bagaimana kewenangan dan kekuasaan pejabat-pejabat saat itu setelah dikuasainya Mandar oleh Pemerintah Hindia Belanda.

#### **2.4 Kerangka Konseptual**

Tema yang akan saya kaji seputar sistem pemerintahan lokal dan pemerintahan Afdeling Mandar. Utamanya dalam kepemimpinan serta pembagian kewenangan dan kekuasaan. Tulisan yang akan saya bahas tentu saja akan berkaitan dengan kepemimpinan tradisional yang merujuk pada pejabat-pejabat kerajaan Balanipa. Sedangkan pembahasan mengenai pembagian kewenangan dan kekuasaan merujuk pada jabatan para pejabat kerajaan yang kemudian dipecah dan diatur ulang oleh pemerintah Belanda. Jabatan tersebut merupakan jabatan yang telah diubah oleh pemerintah belanda yang sebelumnya mempunyai jabatan dalam ranah kerajaan.



**Gambar 2** Kerangka Konseptual